

Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Happy Nurdiana. 1021202036.

(Dibawah bimbingan : Prof. Dr. Erwin M.Si dan Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis (1) Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (3) Eksistensi kewenangan dan tanggung jawab camat Kecamatan Sikakap dalam menjalankan kewenangan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut. Hal ini di dilibat dari kewenangan yang dilimpahkan kepada camat belum sesuai dengan kebutuhannya wilayahnya, kewenangan yang diberikan kepada Camat juga belum sepenuhnya. Dari sisi camatnya belum sepenuhnya memahami bahwa kewenangan yang diterima harus dilaksanakan dengan tepat dan konsisten dan sumber sumber daya manusia (pegawai aparat kecamatan) masih kurang untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain : (a) Ketersediaan dukungan kualitas SDM. (b) Ketersediaan Dukungan Sarana Pasarana, seperti transportasi yang belum memadai dan kondisi jalan yang sebagian besar berbukit, berbatu, berlubang, dan berlumpur. (c) Ketersediaan Dukungan Anggaran. Ketersediaan anggaran yang masih sangat minim, berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparat di Kecamatan Sikakap tersebut. Eksistensi kewenangan dan tanggung jawab Camat Kecamatan Sikakap dalam menjalankan kewenangan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan pelayanan kepada publik yakni hanya sebatas kewenangan administrasi dari Bupati, itupun dengan cakupan yang minimalis pula, sedangkan kewenangan yang diberikan UU hanya terbatas pada beberapa hal saja, itupun hanya bersifat koordinatif.

Kata kunci : Kewenangan Camat, UU No 32 Tahun 2004, Organisasi Kecamatan.